

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di antaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional.

APBN Tahun 2005 yang memperkirakan harga minyak \$24 perbarell. Namun kenyataannya harga terus melambung mencapai rata-rata \$56,6 perbarell. Bahkan harga saat ini mendekati \$ 70 perbarell. Dengan harga minyak dunia semahal ini, pemerintah harus menyediakan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp. 113,7 triliun, kira-kira seperempat keseluruhan belanja negara. Akibatnya APBN akan mengalami defisit sebesar Rp. 46,3 triliun, dimana Rp. 23,2 triliun diantaranya masih sulit untuk dicari pendanaannya.

Jika subsidi BBM dapat dikurangi menjadi Rp. 89,2 triliun, maka tekanan kepada APBN akan berkurang karena defisit menjadi Rp. 25,1 triliun. Tidak ada lagi defisit yang belum jelas sumber pendanaannya. Jelas bahwa kondisi APBN seperti ini jauh lebih sehat dan lebih terkendali. Lebih penting lagi, kondisi ini dapat menjadi landasan untuk langkah-langkah penyesuaian APBN-APBN selanjutnya. Pilihan ini adalah kebijakan yang bertanggungjawab.

Selain itu sebagaimana diketahui selama ini subsidi diberikan kepada harga komoditas BBM. Pemberian subsidi tersebut dinilai kurang tepat, karena pemakaian terbesar untuk BBM adalah sektor transportasi (sekitar 99%) yang lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Dengan demikian, subsidi yang diberikan selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pada tahun 2005 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) mengalami perbedaannya, dimana salah satu bentuk perbedaan tersebut adalah bidang subsidi langsung tunai yang pada tahun 2005 dialokasikan dana sejumlah Rp. 4,65 triliun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000 per rumah tangga per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin.

Dalam mengalokasikan dana subsidi langsung tunai tersebut maka salah satu lembaga yang berperan untuk menyampaikan informasi siapa saja yang berhak menerima dana subsidi tersebut kepada pemerintah adalah Badan Pusat Statistik. Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan tugas mengbadirkan data statistik kepada pemerintah dan masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden